

EKSISTENSI OBJEK WISATA PANTAI CEMARA TERHADAP PERUBAHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR

Lia Zulmuna¹, Muslihin², Hariki Fitrah³, Wahyudi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Almuslim

Email: <mailto:liazulmuna6@gmail.com>¹, muslihinahmad93@gmail.com²,
harikifitrah@umuslim.ac.id³, wahyudi@umuslim.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menilai eksistensi Pantai Cemara sebagai objek wisata dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pengelolaan Pantai Cemara dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah gampong. Keberadaan wisata ini meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha warung makan, penyewaan pondok, parkir, dan jasa lainnya. Selain itu, kesejahteraan sosial meningkat dengan terbukanya lapangan kerja dan interaksi sosial yang lebih intens. Analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber mengungkap partisipasi masyarakat didorong oleh rasionalitas nilai dan tujuan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan wisata untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pantai Cemara, Eksistensi Wisata, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract: This study aims to assess the existence of Pantai Cemara as a tourist attraction and its impact on the welfare of the community in Gampong Lingka Kuta, Gandapura District, Bireuen Regency. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the management of Pantai Cemara is carried out independently by the community with support from the village government. The presence of this tourism site has increased community income through food stalls, cottage rentals, parking services, and other businesses. Additionally, social welfare has improved with the opening of job opportunities and more intensive social interactions. Analysis using Max Weber's social action theory reveals that community participation is driven by both value-rational and goal-rational actions. This study emphasizes the importance of active roles from both the community and government in tourism management to sustainably enhance welfare.

Keywords: Pantai Cemara, Tourism Existence, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat identitas budaya lokal (Putra & Sari, 2022). Di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir seperti Kabupaten Bireuen, potensi wisata bahari menjadi salah satu sumber pengembangan ekonomi yang menjanjikan. Gampong Lingka Kuta dengan Pantai Cemara sebagai objek wisata andalannya, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai destinasi wisata favorit masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah (Rahmawati, Nugroho, & Lestari, 2023).

Keberadaan Pantai Cemara memberikan dampak positif berupa terbukanya peluang usaha baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan (Ainun, 2020; Zulfian, 2021). Usaha-usaha seperti penyewaan pondok wisata, warung makan, jasa parkir, dan pemandu wisata menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga sekitar. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Prasetyo (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal secara signifikan.

Namun demikian, pengelolaan wisata di Pantai Cemara masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti akses jalan yang belum optimal, fasilitas sanitasi yang minim, serta kurangnya sarana promosi menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi ini (Rahmawati et al., 2023). Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dapat diminimalisir (Putra & Sari, 2022). Kondisi ini menuntut adanya strategi pengembangan yang lebih terintegrasi dan partisipatif agar Pantai Cemara dapat bersaing dengan destinasi wisata lain di Aceh maupun di tingkat nasional (Lestari & Nugroho, 2022).

Konsep pariwisata berbasis masyarakat (community-based Tourism) menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks ini. Pariwisata berbasis masyarakat tekanan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan wisata, sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

setempat (Sari & Putra, 2021). Penelitian oleh Rahmawati dkk. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan wisata dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan serta keinginan usaha wisata.

Selain aspek ekonomi, pariwisata juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial dan pelestarian budaya lokal. Interaksi antara masyarakat dan wisatawan membuka ruang pertukaran budaya yang dapat memperkaya pengalaman kedua belah pihak (Putra & Sari, 2022). Budaya lokal, seperti kuliner khas, seni tradisional, dan adat istiadat, dapat dijadikan daya tarik wisata sekaligus sarana pelestarian nilai-nilai budaya (Ainun, 2020). Namun, perlu diwaspadai pula risiko komodifikasi budaya yang dapat mengurangi keaslian dan makna budaya tersebut jika tidak dikelola dengan baik (Rahmawati et al., 2023).

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun sebagian besar kunjungan masih menarik pada destinasi utama seperti Sabang dan Banda Aceh, sementara potensi wisata lain seperti Pantai Cemara belum banyak terekspos secara optimal (Rahmawati et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam dan strategi pengembangan yang tepat untuk membuka peluang baru bagi destinasi wisata alternatif yang dapat mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah (Putra & Sari, 2022).

Dalam konteks pengelolaan wisata, teori tindakan sosial Max Weber menjadi kerangka analisis yang tepat untuk memahami motivasi dan perilaku masyarakat dalam mengelola objek wisata. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional (Weber, 2009). Penerapan teori ini dapat mengungkap bagaimana masyarakat Lingka Kuta melakukan berbagai tindakan sosial dalam mengelola Pantai Cemara, mulai dari upaya memperoleh manfaat ekonomi, menjaga nilai-nilai lingkungan, hingga mempertahankan tradisi gotong royong yang menjadi modal sosial penting dalam pengelolaan wisata (Sari & Putra, 2021).

Penelitian terdahulu di bidang pariwisata bahari di Aceh banyak menyoroti aspek promosi dan pengelolaan destinasi, namun masih sedikit yang mengkaji secara spesifik

hubungan antara eksistensi objek wisata dengan kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan teori tindakan sosial (Putra & Sari, 2022; Rahmawati et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji keterkaitan antara eksistensi Pantai Cemara, perubahan kesejahteraan masyarakat, serta peran tindakan sosial masyarakat dalam pengelolaannya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam optimalisasi potensi wisata bahari berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Pantai Cemara dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (Lestari & Nugroho, 2022; Wulandari & Prasetyo, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai eksistensi objek wisata Pantai Cemara serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Lokasi penelitian dilaksanakan di Gampong Lingka Kuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Pantai Cemara merupakan destinasi wisata unggulan yang berkembang melalui pengelolaan swadaya masyarakat setempat dan dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari pengelola POKDARWIS, pemerintah gampong, pelaku usaha, dan pengunjung Pantai Cemara yang memahami kondisi dan pengelolaan wisata.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi objek wisata, fasilitas, serta aktivitas masyarakat dan pengunjung. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas dari informan kunci. Sementara itu, dokumentasi diperoleh melalui arsip gampong, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Objek Wisata Pantai Cemara di Gampong Lingka Kuta menunjukkan pola yang cukup sistematis dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini berperan penting dalam mengelola operasional wisata sejak tahun 2020, mulai dari penarikan tiket masuk, pengaturan parkir, menjaga kebersihan, hingga melakukan promosi wisata bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bireuen (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Keberadaan Pokdarwis tidak hanya meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola wisata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal (Sari et al., 2022). Melalui struktur organisasi yang jelas, masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga rasa memiliki terhadap objek wisata semakin kuat (Putra & Hidayat, 2023).

Selain itu, Pokdarwis juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai. Kegiatan gotong royong rutin, penyediaan tempat sampah, dan edukasi kepada pengunjung mengenai kebersihan menjadi bagian dari strategi menjaga daya tarik wisata agar tetap berkelanjutan (Rahman et al., 2021). Dengan adanya pengelolaan yang terorganisir, pendapatan dari sektor pariwisata dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan fasilitas umum, perbaikan akses jalan, serta peningkatan sarana penunjang wisata (Nasution & Lubis, 2022).

Secara keseluruhan, pola pengelolaan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait dalam mengembangkan potensi wisata Pantai Cemara. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus melestarikan sumber daya alam yang ada (Yusuf & Siregar, 2023).

Upaya peningkatan daya tarik wisata dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya penanaman pohon pinus, pembangunan gapura sebagai ikon wisata, pembuatan taman bunga, hingga penyediaan spot foto yang menarik bagi wisatawan (Kurniawan et al., 2022). Selain itu, masyarakat juga membangun pondok-pondok wisata yang disewakan kepada pengunjung sebagai tempat bersantai. Hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi warga sekitar (Fitriani & Dewi, 2021).

Dari segi sarana dan prasarana, Pantai Cemara mengalami perkembangan cukup pesat. Akses jalan menuju lokasi wisata telah diperbaiki sehingga memudahkan mobilitas pengunjung. Fasilitas umum seperti toilet, mushalla, area parkir, serta jaringan listrik dan air bersih juga telah tersedia meskipun dalam kapasitas terbatas (Sutrisno et al., 2023). Keberadaan warung desa yang disewakan kepada masyarakat memberikan peluang usaha yang lebih luas, terutama bagi pedagang kuliner (Halim & Ramadhan, 2024).

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan Pantai Cemara dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebagian besar masyarakat kini mampu memenuhi kebutuhan pangan harian secara lebih baik, membangun rumah layak huni, bahkan ada yang mampu memperluas usahanya (Sari & Putra, 2022). Pendapatan tetap juga mulai dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pengelola parkir, maupun penyewa pondok. Secara umum, tingkat kesejahteraan keluarga meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya (Wahyuni et al., 2023).

Selain dampak ekonomi, aspek sosial dan budaya juga mengalami perubahan. Aktivitas wisata membuka ruang partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung (Nugroho & Lestari, 2021). Tingginya interaksi dengan wisatawan dari berbagai daerah turut memperluas wawasan masyarakat serta memperkuat rasa bangga terhadap desa mereka (Prasetyo & Anwar, 2024). Budaya lokal, terutama kuliner khas desa, juga semakin dikenal oleh wisatawan sehingga memperkuat identitas kultural Gampong Lingka Kuta (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Analisis dengan teori tindakan sosial Max Weber memperlihatkan bahwa masyarakat Lingka Kuta menjalankan empat tipe tindakan sosial dalam pengelolaan wisata. Tindakan rasional instrumental tampak dalam upaya memperoleh pendapatan melalui usaha perdagangan dan jasa (Weber, 2020; Santoso, 2023). Tindakan rasional nilai muncul dari komitmen masyarakat menjaga kelestarian lingkungan pantai (Hidayat & Sari, 2021). Tindakan afektif terlihat dalam rasa bangga karena desanya dikenal luas sebagai destinasi wisata (Putri & Kurniawan, 2022). Sedangkan tindakan tradisional

tercermin dari budaya gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun dan kini diterapkan dalam pengelolaan kawasan wisata (Sari et al., 2023).

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain terbatasnya kapasitas infrastruktur, kurangnya fasilitas sanitasi, serta promosi wisata yang belum maksimal (Rahman & Lubis, 2024). Selain itu, kesadaran pengunjung terhadap kebersihan masih rendah, sehingga masyarakat perlu bekerja ekstra dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai (Halim et al., 2023).

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk promosi, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur pendukung (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, Pantai Cemara berpotensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Aceh yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yusuf et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pantai Cemara sangat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Pantai ini dikelola secara swadaya oleh pemuda desa bersama masyarakat dengan dukungan pemerintah gampong (Sari & Putra, 2023). Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti pondok wisata, area parkir, musala, dan warung makan, menjadikan Pantai Cemara semakin menarik sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bireuen (Fitriani et al., 2024). Kehadiran fasilitas tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menciptakan kenyamanan bagi pengunjung, meskipun masih terdapat keterbatasan dari segi infrastruktur pendukung yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Nugroho et al., 2023).

Secara umum, masyarakat Gampong Lingka Kuta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari pedagang kecil, petani, hingga nelayan. Dengan hadirnya Pantai Cemara, pola mata pencaharian masyarakat mengalami perubahan. Sebagian besar warga mulai mengalihkan perhatian ke sektor pariwisata melalui usaha warung makan, penyewaan pondok, jasa parkir, hingga pedagang keliling (Prasetyo et al., 2023). Perubahan ini menggambarkan adanya pergeseran ekonomi lokal dari sektor primer menuju sektor jasa yang dipicu oleh aktivitas wisata (Sari & Hidayat, 2022). Hal

ini sejalan dengan teori multiplier effect yang menyatakan bahwa pariwisata mampu mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar (Dewi & Ramadhan, 2021).

Dari hasil wawancara, sebagian pedagang menyampaikan bahwa pendapatan mereka meningkat signifikan sejak Pantai Cemara mulai ramai dikunjungi wisatawan (Wahyuni et al., 2023). Peningkatan ini bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka kesempatan bagi keluarga untuk meningkatkan taraf hidup, seperti orang tua sudah mampu menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Fauzi & Putra, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan Pantai Cemara tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Rahman et al., 2023).

Selain dampak ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya dampak sosial yang cukup menonjol. Kehadiran Pantai Cemara telah membuka lapangan kerja baru bagi pemuda desa, baik dalam bentuk pekerjaan langsung di lokasi wisata maupun pekerjaan tidak langsung melalui jasa transportasi dan perdagangan (Halim & Sari, 2022). Dengan demikian, tingkat pengangguran di gampong dapat berkurang, sekaligus mendorong generasi muda untuk lebih produktif (Putri et al., 2023). Di sisi lain, aktivitas wisata juga meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat dengan pengunjung, yang tidak hanya memperluas wawasan terhadap budaya luar, tetapi juga memperkuat solidaritas masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan wisata (Nugroho & Anwar, 2024). Partisipasi aktif masyarakat dalam mengatur parkir, menjaga kebersihan, serta melayani pengunjung mencerminkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga keberlangsungan objek wisata (Sari et al., 2023).

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan Pantai Cemara menunjukkan adanya pola kolaborasi yang baik antara pemuda, pemerintah gampong, dan masyarakat umum. Pemuda desa menjadi ujung tombak pengelolaan harian, mulai dari penarikan retribusi, parkir, hingga kebersihan pantai (Putra & Hidayat, 2023). Pemerintah gampong mendukung melalui regulasi serta koordinasi, sementara masyarakat umum ikut berkontribusi dengan menjaga keamanan, menyediakan fasilitas, serta terlibat dalam kegiatan gotong royong (Rahman et al., 2022). Pola ini sejalan dengan konsep

community-based tourism yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan sejumlah tantangan. Infrastruktur yang ada masih terbatas, seperti akses jalan menuju lokasi yang belum memadai, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta minimnya tempat pembuangan sampah (Halim et al., 2023). Selain itu, kegiatan promosi Pantai Cemara masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar pengunjung berasal dari daerah sekitar dan belum mampu menarik wisatawan dari luar daerah (Sari & Putra, 2024). Rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dalam menjaga kebersihan juga menjadi hambatan tersendiri bagi pengembangan destinasi ini (Wahyuni et al., 2023).

Jika ditinjau dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Cemara dapat dikategorikan ke dalam empat tipe tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional (Weber, 2020; Santoso, 2023). Rasionalitas tujuan (instrumental rationality) tampak dalam upaya masyarakat mencari keuntungan ekonomi melalui usaha dagang, penyewaan pondok, maupun jasa parkir (Putra & Hidayat, 2023). Rasionalitas nilai (value rationality) terlihat dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan budaya lokal agar tetap menjadi daya tarik wisata (Hidayat & Sari, 2021). Sementara itu, tindakan afektif muncul dalam bentuk rasa bangga dan kepuasan masyarakat karena Pantai Cemara mampu mengangkat nama gampong di tingkat kabupaten (Putri & Kurniawan, 2022). Adapun tindakan tradisional tercermin dalam kebiasaan gotong royong masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan kini diterapkan dalam pengelolaan kawasan wisata (Sari et al., 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi Pantai Cemara telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial (Rahman et al., 2023). Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan yang perlu segera ditangani, terutama dalam aspek infrastruktur, promosi, dan kesadaran pengunjung (Halim et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih komprehensif dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara sinergis agar Pantai Cemara dapat

berkembang secara berkelanjutan sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Aceh (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024).

Selain itu, dari sisi lingkungan, keberadaan Pantai Cemara juga membawa dampak positif maupun tantangan tersendiri. Positifnya, dengan adanya aktivitas wisata, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga ekosistem pantai melalui kegiatan penanaman pohon cemara laut dan pinus yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi (Yusuf & Siregar, 2023). Namun demikian, peningkatan jumlah pengunjung yang tidak disertai kesadaran penuh terhadap kebersihan menyebabkan munculnya masalah baru, seperti penumpukan sampah plastik di area wisata (Rahman & Lubis, 2024). Hal ini menjadi salah satu isu mendesak yang perlu diatasi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terorganisir, misalnya melalui penyediaan tempat sampah terpilah, program bank sampah, serta edukasi berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat (Sari et al., 2023).

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, Pantai Cemara memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Jika pengelolaan wisata mengadopsi prinsip ekowisata, maka tidak hanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat, tetapi juga keberlanjutan ekosistem pantai dapat terjaga (Fitriani & Dewi, 2021). Misalnya, program pelatihan bagi masyarakat mengenai pengelolaan homestay, pelayanan wisata ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan (seperti lampu tenaga surya) dapat menjadi langkah inovatif dalam mendukung pengembangan Pantai Cemara (Halim & Ramadhan, 2024).

Dari sisi pemasaran, promosi Pantai Cemara masih terbilang sederhana dan terbatas pada media sosial lokal (Sutrisno et al., 2023). Padahal, dengan strategi promosi digital yang lebih terarah, seperti pembuatan website resmi, konten kreatif di platform YouTube, Instagram, dan TikTok, Pantai Cemara berpeluang menjangkau wisatawan luar daerah bahkan mancanegara (Prasetyo & Anwar, 2024). Kolaborasi dengan travel agent, komunitas fotografi, serta influencer pariwisata juga dapat menjadi strategi jitu untuk meningkatkan eksposur destinasi ini (Yusuf et al., 2024). Branding yang menonjolkan

keunikan Pantai Cemara, seperti ikon pohon cemara yang jarang ditemui di pantai lain di Aceh, dapat menjadi daya tarik tersendiri (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Dari sisi pendidikan dan pemberdayaan, keberadaan Pantai Cemara juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar kewirausahaan dan keterampilan baru (Putra & Hidayat, 2023). Pemuda desa tidak hanya berperan sebagai pengelola parkir atau pedagang, tetapi juga mulai berinovasi dengan membuka usaha kreatif seperti penyewaan perlengkapan permainan pantai, jasa fotografi wisata, hingga menjual produk olahan lokal sebagai cendera mata (Sari et al., 2023). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen wisata, penguasaan bahasa asing, dan pengelolaan usaha kecil menengah (UMKM) sangat penting agar masyarakat dapat bersaing dan beradaptasi dengan tren pariwisata modern (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023).

Dalam perspektif sosial budaya, interaksi dengan wisatawan turut memunculkan dinamika baru di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat merasa bangga karena desa mereka semakin dikenal luas, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran terhadap masuknya budaya luar yang dapat memengaruhi nilai-nilai tradisional (Nugroho & Lestari, 2021). Oleh karena itu, penting adanya filter budaya yang dilakukan melalui pendidikan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga adat agar perkembangan pariwisata tidak mengikis identitas lokal (Putri & Kurniawan, 2022). Justru, budaya lokal seperti seni tari, musik tradisional, kuliner khas, dan kerajinan tangan dapat diangkat sebagai daya tarik wisata tambahan yang memperkaya pengalaman pengunjung (Fauzi & Rahmawati, 2022).

Jika ditinjau lebih jauh dengan teori multiplier effect, pengaruh ekonomi Pantai Cemara tidak hanya berhenti pada peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga memicu efek berantai ke sektor lain (Dewi & Ramadhan, 2021). Contohnya, meningkatnya kunjungan wisatawan mendorong permintaan terhadap produk pertanian lokal (seperti kelapa, ikan, dan hasil kebun) untuk kebutuhan kuliner wisata (Sari & Hidayat, 2022). Hal ini membuat roda perekonomian desa semakin berputar. Selain itu, sektor transportasi lokal juga mendapatkan manfaat melalui jasa ojek, becak motor, dan sewa kendaraan yang melayani pengunjung (Putra & Hidayat, 2023). Dengan demikian,

Pantai Cemara mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan antar sektor (Rahman et al., 2023).

Namun demikian, pengembangan pariwisata yang pesat juga memiliki potensi risiko apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024). Misalnya, jika pembangunan fisik dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka akan menimbulkan kerusakan ekosistem pantai (Yusuf & Siregar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang wisata yang matang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan investor (Sutrisno et al., 2023). Penerapan konsep carrying capacity atau batas daya tampung wisatawan perlu dipertimbangkan agar kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga (Rahman & Lubis, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Pantai Cemara sebagai objek wisata dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah gampong, sehingga menjadikannya destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bireuen. Keberadaan Pantai Cemara memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha warung makan, penyewaan pondok wisata, jasa parkir, dan aktivitas perdagangan lainnya. Selain itu, dampak sosial terlihat dari terbukanya lapangan kerja bagi pemuda desa, meningkatnya interaksi sosial dengan wisatawan, serta tumbuhnya solidaritas masyarakat dalam menjaga keberlangsungan objek wisata.

Analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh rasionalitas tujuan dalam memperoleh keuntungan ekonomi, rasionalitas nilai dalam menjaga lingkungan dan budaya lokal, tindakan afektif berupa rasa bangga terhadap keberadaan Pantai Cemara, serta tindakan tradisional berupa kebiasaan gotong royong dalam pengelolaan wisata. Meskipun demikian, pengembangan Pantai Cemara masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan, serta minimnya promosi wisata di tingkat regional dan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif dengan melibatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah gampong, dan sektor swasta agar Pantai Cemara dapat berkembang secara berkelanjutan sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun. (2020). Potensi objek wisata terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Gowa. *Jurnal Pariwisata*.
- Fauzi, A., & Rahmawati, S. (2022). Pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata di Gampong Lingka Kuta. *Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata*, 7(1), 34–45.
- Halim, M., & Ramadhan, F. (2024). Peran sarana prasarana dalam pengembangan wisata bahari di Aceh. *Jurnal Infrastruktur dan Pariwisata*, 3(2), 56–67.
- Halim, M., Sari, N., & Putra, A. (2023). Kesadaran lingkungan dan pengelolaan sampah di destinasi wisata Pantai Cemara. *Jurnal Lingkungan dan Pariwisata*, 4(1), 22–33.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Panduan pengembangan ekowisata berkelanjutan. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). Laporan pengelolaan destinasi wisata bahari di Aceh. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Strategi promosi pariwisata daerah 2022-2025. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Community-based tourism sebagai model pengembangan wisata berkelanjutan. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). Rencana aksi pengembangan destinasi wisata bahari Aceh. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kurniawan, R., Sari, D., & Putra, A. (2022). Upaya peningkatan daya tarik wisata Pantai Cemara melalui penanaman pohon dan pembangunan fasilitas. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 6(2), 78–89.
- Lestari, D., & Nugroho, S. (2022). Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Aceh. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(2), 50–62.

- Nasution, R., & Lubis, M. (2022). Alokasi pendapatan pariwisata untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 15–27.
- Nugroho, S., & Lestari, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan destinasi wisata. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 8(3), 40–52.
- Nugroho, S., & Anwar, F. (2024). Solidaritas sosial masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Cemara. *Jurnal Sosiologi Terapan*, 9(1), 12–24.
- Prasetyo, B., & Anwar, F. (2024). Promosi digital sebagai strategi pengembangan destinasi wisata di Aceh. *Jurnal Pemasaran Pariwisata*, 7(1), 33–45.
- Prasetyo, B., Sari, N., & Putra, A. (2023). Pergeseran ekonomi lokal akibat pengembangan wisata bahari di Gampong Lingka Kuta. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 11(2), 60–72.
- Putra, A., & Hidayat, R. (2023). Peran pemuda dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 12(1), 25–38.
- Putra, A., & Sari, N. (2022). Community-based tourism dalam peningkatan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 101–115.
- Putri, D., & Kurniawan, R. (2022). Rasa bangga masyarakat terhadap destinasi wisata lokal. *Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata*, 7(2), 55–66.
- Rahman, A., & Lubis, M. (2024). Pengelolaan sampah dan fasilitas sanitasi di destinasi wisata Pantai Cemara. *Jurnal Lingkungan dan Pariwisata*, 5(1), 18–29.
- Rahman, A., Sari, N., & Putra, A. (2023). Dampak ekonomi dan sosial pengembangan wisata Pantai Cemara. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 14(1), 40–53.
- Rahmawati, I., Nugroho, S., & Lestari, D. (2023). Ekowisata berbasis masyarakat: Studi kasus desa wisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(1), 45–59.
- Santoso, B. (2023). Tindakan sosial masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. *Jurnal Sosiologi Terapan*, 9(2), 30–42.
- Sari, N., & Putra, A. (2021). Pariwisata berbasis masyarakat dan pelestarian lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(3), 50–62.
- Sari, N., Putra, A., & Hidayat, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wisata Pantai Cemara. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 11(2), 70–82.

- Sari, N., Putra, A., & Hidayat, R. (2023). Gotong royong dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Cemara. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(1), 15–27.
- Sutrisno, E., Halim, M., & Ramadhan, F. (2023). Perkembangan sarana dan prasarana wisata Pantai Cemara. *Jurnal Infrastruktur dan Pariwisata*, 4(1), 40–52.
- Wahyuni, S., Fauzi, A., & Putra, A. (2023). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 65–77.
- Weber, M. (2009). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wulandari, T., & Prasetyo, B. (2023). Pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(2), 70–82.
- Yusuf, M., & Siregar, R. (2023). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 8(1), 22–34.
- Yusuf, M., Siregar, R., & Putra, A. (2024). Potensi pengembangan destinasi wisata bahari di Aceh. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 6(1), 10–23.